

OPINI

PEN, Zombies & Cipta Kerja

Kasus Covid-19 sudah mencapai 90,86 juta dan menewaskan 1,95 juta orang di dunia dan sudah mencapai 836.718 kasus serta menewaskan 24.343 orang di Indonesia (*Worldometers*, 11/1). Pandemi Covid-19 bukan saja menelan dan mengancam nyawa, bahkan telah membahayakan perekonomian nasional. Ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi di triwulan II/2020 terkontraksi 5,32% dan di triwulan III/2020 masih terkontraksi sebesar 3,49%.

Keputusan pemerintah memilih PSBB berdampak pada pola kerja yakni penerapan *work from home* dan menerapkan *physical distancing* adalah keputusan yang mengutamakan keselamatan. Kendati memperlambat pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini juga sebagai penyeimbang agar ekonomi tidak lumpuh dan pada bila pemerintah menempuh kebijakan *lockdown* yang dapat mengakibatkan kelumpuhan kegiatan ekonomi dan dapat membangkrutkan negara, seperti Brasil dinyatakan bangkrut oleh Presiden Jair Bolsonaro, Rabu (6/1).

Pemerintah telah mengalokasikan biaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun dengan alokasi kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun dan sektoral kementerian/lembaga serta Pemda Rp106,11 triliun, berdasarkan data Kemenkeu pada 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyanti pada 1 Desember 2020 menyatakan bahwa realisasi program PEN hingga pertengahan pekan yakni 23 Desember 2020 baru mencapai Rp502,71 tr-

iliun atau 72,3% dari pagu. Bagaimanapun, penyerapan yang lambat akan berpengaruh pada akselerasi PEN, termasuk penyerapan dari sisi realisasi belanja negara (APBN) pada Oktober 2020 masih relatif rendah, yaitu Rp2.041,8 triliun yakni 74,70% dari pagu 2020 sebesar Rp2.733,17 triliun.

Dari sisi kebijakan moneter, pada 24 Juli 2020, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa bank sentral bahkan telah menerapkan berbagai kebijakan ultra akomodatif dalam memitigasi Covid-19, antara lain penurunan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran moneter sebesar Rp633,24 triliun, penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN, penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjaminan Simpanan dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran.

Esensi dari semua kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini adalah berfokus pada manusia, demi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara, di mana semua upaya diarahkan pada keberlangsungan usaha, kesehatan masyarakat dan menyeimbangkan keduanya, termasuk mendorong tercapainya *human perfectibility* (kualitas kehidupan) yang lebih baik dan manusiawi.

Di awal 2020, Paul Krugman, peraih Nobel Ekonomi 2008, menerbitkan buku berjudul *Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future*. Buku ini merupakan kompilasi tulisannya yang kebanyakan terbit di *The New York Times* selama dua dekade meski muatannya banyak membahas kondisi era Donald Trump.

Krugman menggunakan istilah *zombies* bagi terjadinya kesenjangan yang parah antara keterampilan dan



BATARA M. SIMATUPANG
Dosen Tetap MM Indonesia
Banking School

pekerjaan. Pada 2014 terdapat 11 juta pengangguran di AS dan 4 juta lowongan pekerjaan tidak terisi. Ini menimbulkan jurang pemisah antara keterampilan pekerja dan kebutuhan keterampilan oleh majikan (pengusaha).

Kondisi ini membawa mitos keterampilan identik dengan mitos krisis keuangan yang selalu membayangi dan memiliki efek mengerikan bila dijalankan dengan kebijakan yang salah. Bila negara memainkan perannya secara bijaksana, dapat membuat perbedaan nyata terhadap *outcome*, sehingga membuat masalah bagi rakyat.

Jadi, dalam tekanan pandemi, pemerintah yang baik dan bijaksana adalah pemerintah yang mengutamakan keselamatan warganya sekaligus mempertahankan berjalannya roda perekonomian yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada Agustus 2020 bahwa jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 9,77 juta orang (termasuk 2,67 juta orang akibat dampak Covid-19). Alhasil, terdapat *grey area* yang memungkinkan munculnya ide *zombies*, yaitu kesen-

jangan antara keterampilan dan kebutuhan keterampilan. Kondisi demikian memungkinkan munculnya *chaos* pada kalangan marginal dan kemungkinan bisa bergeser ke kalangan menengah.

Dibutuhkan peran aktif pemerintah yang bijak dan baik untuk menyelamatkan para pekerja Indonesia, yaitu dengan menghilangkan *zombies* akibat adanya disparitas kesenjangan keterampilan dan kebutuhan akan keterampilan.

Dengan adanya UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), ia berperan sebagai jalan keluar yang terbaik sebagai payung hukum meski ditrespon negatif oleh masyarakat, khususnya pekerja dan serikat-serikat pekerja.

UU Cipta Kerja diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian, serta selaras dengan bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan asas yang terkandung di dalamnya, rekayasa *zombies* dapat dihindari. Kesadaran para pekerja dan serikat-serikat pekerja atas besarnya manfaat UU Cipta Kerja harus ditumbuhkan. Produk hukum ini tentu saja mengakhiri ketidaktuntunan antara Undang-Undang, peraturan pusat, dan daerah.

Terlampau prematur melakukan penolakan pada Undang-Undang ini, karena pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan pemerintah yang lebih rinci.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga dilampirkan foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak memintakannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnisid.com.